

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan administratif dan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta mengakomodir bertambahnya beban kerja pada Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur dan susunan organisasi pada Biro-Biro dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);

- b. Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 6);
- c. Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 14).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Biro Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, kependudukan, prasarana fisik dan pertanahan serta wilayah administrasi dan perbatasan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Biro Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, kependudukan, prasarana fisik dan pertanahan serta wilayah administrasi dan perbatasan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, kependudukan, prasarana fisik dan pertanahan serta wilayah administrasi dan perbatasan;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, kependudukan, prasarana fisik dan pertanahan serta wilayah administrasi dan perbatasan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Biro Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Bagian Pemerintahan Umum, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Tata Praja;
 2. Subbagian Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah; dan
 3. Subbagian Tata Usaha.
 - b. Bagian Kependudukan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Administrasi Kependudukan;
 2. Subbagian Catatan Sipil; dan
 3. Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Data.
 - c. Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Keagrariaan;
 2. Subbagian Perizinan; dan
 3. Subbagian Prasarana Fisik.
 - d. Bagian Wilayah Administrasi dan Perbatasan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Penegasan Batas Daerah;
 2. Subbagian Dokumentasi Batas Daerah; dan
 3. Subbagian Toponimi dan Pengembangan Wilayah.
4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Biro Perekonomian, terdiri dari :

- a. Bagian Bina Sarana Perekonomian, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Bina Kerjasama Ekonomi;
 2. Subbagian Bina Perdagangan; dan
 3. Subbagian Bina BUMD dan Lembaga Keuangan.
- b. Bagian Bina Produksi, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Bina Makanan Pangan dan Kelautan;
 2. Subbagian Bina Kehutanan dan Perkebunan; dan
 3. Subbagian Bina Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

- c. Bagian Bina Industri dan UKM, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Bina Usaha Industri;
 - 2. Subbagian Bina Koperasi; dan
 - 3. Subbagian Bina UMKM dan Kewirausahaan.
 - d. Bagian Bina Perhubungan dan Pariwisata, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Subbagian Bina Perhubungan dan Komunikasi; dan
 - 3. Subbagian Bina Kepariwisataaan.
5. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :

- a. Bagian Data, Informasi dan Dokumentasi, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi;
 - 2. Subbagian Dokumentasi dan Audio Visual; dan
 - 3. Subbagian Fasilitas Penanganan Pengaduan.
- b. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Pemberitaan;
 - 2. Subbagian Publikasi, Penerangan dan Distribusi; dan
 - 3. Subbagian Hubungan Media dan Kerjasama.
- c. Bagian Protokol, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Acara;
 - 2. Subbagian Tamu Pimpinan; dan
 - 3. Subbagian Hubungan Keprotokolan.
- d. Bagian Administrasi dan Perjalanan Dinas, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Administrasi Pimpinan;
 - 2. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
 - 3. Subbagian Perjalanan Dinas.

6. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: 10 /2014)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

